

PERAN GP ANSOR DALAM MENJAGA KETERTIBAN DI KABUPATEN JOMBANG PASCA PERISTIWA G30S/PKI PADA TAHUN 1965-1966

DWI NUR HIDAYATULLOH

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: hidayatullohdwi1@gmail.com

Sumarno

S1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: Sumarno@unesa.ac.id

Abstrak

GP Ansor mempunyai peranan yang penting bagi bangsa Indonesia, termasuk di Jombang, Jawa Timur. Secara keorganisasian GP Ansor di Jombang mempunyai peran yang cukup vital di tengah masyarakat Jombang karena GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan NU yang bertugas untuk mengawal keamanan organisasi NU terutama kyai-kyai NU beserta ajaran Ahlussunnah waljamaah dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan dan menghancurkan NU. Fungsi GP Ansor di Jombang adalah sebagai Instrumen untuk menjaga kebersamaan, kesolidan dan meneguhkan komitmen untuk terus bisa menjadi manfaat bagi masyarakat dan menjaga bangsa dan negara Indonesia dari intoleransi, Radikalisme, Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Di kabupaten Jombang mayoritas penduduknya menganut islam beraliran NU, hal itu dikarenakan pendiri NU yaitu KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Chasbullah berasal dari Jombang sehingga NU tumbuh pesat di Jombang. Selain itu banyak pondok pesantren besar di Jombang yang beraliran NU, sehingga NU dan GP Ansor menjadi organisasi yang cukup disegani oleh masyarakat Jombang.

Oleh karena itu penelitian terkait Peran GP Ansor dipandang sangat penting mengingat beberapa peranya dalam perjuangan, dalam hal ini peran perjuangannya dalam membela Pancasila dari Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Komunis dan memusuhi organisasi keagamaan yang ada di Indonesia salah satunya adalah NU dan melakukan teror terhadap masyarakat NU di Jombang. Dan didalam penelitian ini membahas tentang Peran GP Ansor di kabupaten Jombang dalam menjaga ketertiban pasca peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965 dan memulihkan kembali keadaan sosial, keamanan dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat di kabupaten Jombang.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1) Bagaimana situasi dan kondisi di kabupaten jombang setelah peristiwa G30S/PKI TAHUN 1965 ?, 2) Bagaimana peran GP ANSOR wilayah jombang dalam menjaga ketertiban dan Keamanan di kabupaten Jombang pasca peristiwa G 30S/PKI pada tahun 1965-1966 ?, 3) Bagaimana penanganan anggota PKI yang ada di kabupaten Jombang pada tahun 1965-1966?

. Dalam penelitian ini digunakan Metode penulisan sejarah. Tahap pertama adalah Heuristik yaitu mengumpulkan sumber primer dan sekunder. Sumber primer diantaranya Dokumen-dokumen Arsip "Pucuk Pimpinan GP Ansor atas Gerakan 30 September 1965", Arsip Surat PBNU kepada Dewan Harian PP GP Ansor tentang "Sikap Tegas Terhadap Komunisme", Wawancara dengan pelaku sejarah (BANSER senior yang ikut melakukan operasi penumpasan PKI di Jombang, serta sumber primer yang lainnya. Sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku seperti buku "Palu Arit diladang tebu" Sejarah pembantaian massal yang terlupakan, Jombang-Kediri 1965-1966. karya Hermawan Sulisty. Kritik adalah tahap kedua yang bertujuan untuk menyeleksi sumber yang valid. Tahap ketiga adalah intepretasi dilakukan dengan mengaitkan sumber dan menganalisis sumber. Historiografi adalah tahap terakhir dalam penulisan sejarah. Historiografi adalah penulisan kembali dari hasil intepretasi dalam bentuk skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diperoleh kesimpulan bahwa operasi penumpasan GP Ansor di Jombang dalam menumpas PKI sangat kecil dan minim dibandingkan dengan daerah lain di Jawa timur hal itu disebabkan karna GP Ansor di Jombang yang melakukan penumpasan hanya dua sampai tiga orang dan targetnya hanya 1 orang PKI yang membuat onar di Jombang dan melakukan pembelaan bahwa PKI tidak bersalah dalam peristiwa Gestapu. Setelah penumpasan diberhentikan oleh kodam brawijaya pada agustus 1966, tidak ada lagi operasi yang dilakukan oleh GP Ansor jombang dan kehidupan masyarakat berangsur normal namun hal berbeda dialami oleh keluarga Ex PKI selain sanksi sosial berupa cemoohan dari masyarakat dan sedikit terasingkan dari pergaulan masyarakat yang tidak dapat menjadi pejabat pemerintahan atau pegawai negeri sipil hal itu berlangsung sampai tahun 1988 masih terjadi di Jombang.

Kata Kunci: Peran, GP Ansor, G30S/PKI, Penumpasan

Abstract

GP Ansor has an important role for the Indonesian people, including in Jombang, East Java. Organizationally, GP Ansor in Jombang has a vital role in the community of Jombang because GP Ansor is an NU youth organization whose job it is to guard the security of NU organizations, especially NU kyai and Ahlussunnah waljamaah teachings from those who want to overthrow and destroy NU. The function of GP Ansor in Jombang is as an instrument to maintain togetherness, solidity and to affirm the commitment to continue to be of benefit to society and to protect the Indonesian nation and state from intolerance, radicalism, ideology that is contrary to Pancasila. In Jombang district, the majority of the population adhere to NU Islam, this is because the founder of NU, KH. Hasyim Asy'ari and KH. Wahab Chasbullah came from Jombang so NU grew rapidly in Jombang. In addition, many large Islamic boarding schools in Jombang have NU affiliations, so that NU and GP Ansor are organizations that are quite respected by the people of Jombang.

Therefore, research related to the role of GP Ansor is considered very important considering some of its roles in the struggle, in this case the role of his struggle in defending Pancasila from the September 30, 1965 Movement carried out by the PKI who wanted to replace the Pancasila ideology into Communist ideology and be hostile to religious organizations in Indonesia. one of them was NU and carried out terror against the NU community in Jombang. And in this study discusses the role of GP Ansor in Jombang district in maintaining order after the 1965 G30S / PKI incident and restoring social conditions, security and order in social life in Jombang district.

The formulations of the problems to be discussed are 1) What is the situation and conditions in Jombang district after the G30S / PKI incident in 1965-1966 ?, 2) What is the role of the GP ANSOR in the Jombang region in maintaining order and security in Jombang district after the G 30S / PKI incident in 1965-1966?, 3) How was the handling of PKI members in Jombang district in 1965-1966?

In this research, the method of writing history is used. The first stage is Heuristics, namely collecting primary and secondary sources. Primary sources include the Archive Documents "Top Leadership of GP Ansor for the September 30, 1965 Movement", Archives of PBNU Letters to the Daily Council of PP GP Ansor on "Decisive Attitudes Against Communism", Interviews with historical actors (senior BANSER who participated in the PKI suppression operation in Jombang and other primary sources, while secondary sources are books such as the book "Palu and Arit in the Sugarcane Field" The forgotten history of mass slaughter, Jombang-Kediri 1965-1966, by Hermawan Sulistyio. Criticism is the second stage which aims to select sources that are suitable The third stage is the interpretation carried out by linking the source and analyzing the source. Historiography is the last stage in writing history. Historiography is the rewriting of the interpretation result in the form of this thesis.

Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded that the suppression operation of GP Ansor in Jombang was very small and minimal compared to other areas in East Java, this was because GP Ansor in Jombang carried out the crackdown on only two to three people and the target was only 1 PKI person who made trouble in Jombang and defended that PKI was innocent in the Gestapu incident. After the crackdown was stopped by the Brawijaya Military Command in August 1966, there were no more operations carried out by GP Ansor Jombang and community life gradually normalized but different things experienced by the Ex PKI family apart from social sanctions in the form of ridicule from the community and being slightly isolated from the association of people who could not become officials government or civil servants it continued until 1988 still happening in Jombang.

Keywords: Role, GP Ansor, G30S / PKI, Eradication

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama islam. Terdapat banyak organisasi islam di Indonesia , salah satunya adalah NU. NU adalah organisasi para ulama(bentuk jama' dari alim yang berarti "orang berilmu"),yaitu orang-orang yang mengetahui secara mendalam segala hal yang berkaitan dengan agama islam.Ulama juga sebagai penerus dakwah nabi dalam mengajarkan agama islam dan tanpa ulama eksistensi agama islam tidak akan konsisten hingga saat ini.Ulama mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina umat islam di indonesia.¹

NU didirikan oleh tokoh ulama terkemuka yang berasal dari jombang jawa timur yaitu Hadritus syech KH Hasyim asy'ari pada tahun 1926 Masehi.Seiring dengan berjalanya waktu NU berkembang menjadi ormas keagamaan terbesar di indonesia dan turut serta dalam mewarnai kehidupan sosial dan perpolitikan di indonesia.² NU mempunyai organisasi kepemudaan yang bernama GP Ansor.GP Ansor didirikan pada tanggal 14 desember 1949 dan Chamid Widjaja sebagai ketua umum pertama periode 1949-1954 dan berkembang sampai sekarang.³ GP Ansor bertugas untuk mengawal keamanan tokoh-tokoh NU dan organisasi NU dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan tokoh-tokoh, kyai-kyai NU bahkan yang

¹ Martahan Sitompul,Einar.2011,NU dan Pancasila.Yogyakarta:LkiS,hal:5

² Greg Barton,Biografi gus dur,The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid,(Yogyakarta:Lkis,2002),Hal 15

³ Chairul Anam,Gerak Langkah Pemuda Ansor:Seputar Sejarah Kelahiran(Surabaya:PT Antar Surya Jaya,1990),17-18

mengancam kedaulatan NKRI. Salah satu peristiwa sejarah terbesar di Indonesia dan mengancam kedaulatan NKRI adalah peristiwa G30 S/PKI tahun 1965 Masehi.

G30 S/PKI merupakan sebuah percobaan kudeta kepada pemerintahan republik Indonesia yang sah oleh komunis dan pada saat itu mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia tersendiri terutama kelompok Islam.⁴ Perseteruan antara PKI dengan umat Islam berawal dari aksi sepihak PKI dengan menunggangi UUPA No 5/1960 yang salah satu pasalnya adalah sebagai berikut, Pasal 9 (ayat 2) yang menyatakan bahwa, "Tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya, baik dari diri sendiri maupun keluarganya. Hal itu juga didukung dengan pasal 33 UUD 1945 yang mengatahkan bahwa "bumi dan air serta kekayaan alam yang terdapat didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".⁵

PKI melakukan manuver politik sejak tahun 1950 an dengan mencari dukungan dari buruh dan tani hal itu dibuktikan dengan dikuasainya Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). PKI memimpin aksi-aksi para buruh untuk menuntut keadilan terhadap kaum-kaum borjuis atau para orang-orang kaya agar membagi rata hartanya kepada kaum buruh. PKI melakukan penyempurnaan sistem organisasi SOBSI dengan Plan (rencana) tiga tahun. Kebanyakan basis massa terbesar PKI terdapat di pedesaan dikarenakan komposisi penduduk di Indonesia pada tahun 1950 sebanyak 80% terdapat di desa. Oleh sebab itu PKI menjadikan desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan keperluan hidup, dan markas untuk menghimpun kekuatan dalam menyusun rencana revolusi serta membangun pertahanan dari kaum kontra revolusioner karna wilayah pedesaan masih terisolasi dan pemetaan wilayah yang belum diketahui oleh kaum kontra revolusioner. Hal ini melahirkan jargon PKI yaitu "desa mengepung kota".

Berikut merupakan strategi PKI untuk melancarkan tujuannya dan menumbuhkan kembali ideologi komunis di Indonesia.

1. Tahun 1950 an tokoh-tokoh PKI pulang dari pengasingan, kemudian menciptakan slogan sebagai pendukung Pancasila, Pancasila yang didukung adalah Pancasila 1 Juni yang berjiwa Tri sila dan Eka sila, gotong royong karna mudah diperas-peras dan disesuaikan dengan dalil paham komunis karna dilemahkannya sila ketuhanan yang maha esa.

2. Tiba-tiba menjadi pendukung setia Soekarno (tipu muslihat PKI) dan menciptakan aroma magis untuk Soekarno dan segala yang melekat untuk kebesaran Soekarno. Sehingga Soekarno yang semula menentang PKI karena pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 menjadi terpesona dengan sanjungan PKI.

3. Menciptakan slogan yang membuai penguasa (Soekarno), seperti yang: Anti revolusi, Kontra revolusi dituduh anti Soekarno, dan yang pro barat dituduh anti Soekarno.

Langkah PKI dalam menghimpun masa di desa adalah dengan menyusupi organisasi BTI (Barisan Tani Indonesia) yang sebelumnya di bawah naungan PNI yang dipimpin oleh Sadjarwo. PKI memprovokasi massa BTI dengan slogan "tanah untuk kaum petani" dan dengan mudah PKI menjadikan BTI menjadi ormas PKI secara penuh. PKI juga melancarkan provokasi melalui buku yang disebarkan kepada seluruh petani dan untuk dijadikan pedoman yang berjudul "Kaum Tani Mengganyang Setan-Setan Desa". Setan desa yang dimaksud dalam buku tersebut adalah dari kalangan Kiai dan Ulama desa yang oleh PKI dianggap sebagai tuan tanah jahat, Tengkulak jahat, Penghisap darah rakyat, penguasa jahat, bandit desa, Tukang ijon, dan penghalang kemajuan rakyat di desa. Aksi mengganyang setan-setan desa yang salah satu sasarannya adalah para kyai dan ulama menimbulkan dendam tersendiri bagi masyarakat desa yang santri terutama kyai dan ulama yang mempunyai kharisma yang besar di wilayah tersebut.. Usaha menghancurkan pengaruh para ulama di desa dengan merekrut dan mempengaruhi pemuda-pemuda yang non santri di desa dan masyarakat yang tidak agamis untuk memilih tokoh dan perangkat desa yang berhaluan komunis untuk dijadikan lurah dan pemuka kampung, strategi tersebut juga untuk mematahkan ormas-ormas Islam dan partai Islam. Banyak aksi-aksi diskriminasi oleh PKI terhadap kaum ulama membuat para kaum santri ikut melakukan penumpasan anggota PKI dan simpatisannya pasca pemberontakan G 30S/PKI.⁶

Diberbagai daerah di Jawa Timur seperti di Blitar, Sidoarjo, dan Banyuwangi seluruh massa PKI melakukan aksi sepihak dengan menjarah tanah terutama tanah para tuan tanah yang menjadi anggota dari Nadhlatul Ulama (NU).⁷ Berbagai macam pergolakan penentangan dari Gp Ansor terkait aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. Dari sini peneliti tertarik untuk mengangkat judul " Peran GP Ansor dalam menjaga ketertiban di kabupaten Jombang pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1965-1966. Untuk mendeskripsikan Situasi Kota Jombang sebagai pusat basis NU (GP ANSOR) pasca Tragedi G30 S/PKI Tahun 1965 sampai tahun 1966" dengan alasan dan penulis tertarik untuk mengungkap situasi di kabupaten Jombang sebagai basis terbesar NU dan Gp ansor terbesar di Jawa Timur.

METODE

Metode merupakan aturan atau petunjuk yang digunakan untuk memahami sesuatu objek dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan keraguan pada jawaban yang diperoleh dan dapat diuji keabsahannya.⁸ Sedangkan menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara manusia untuk mendapatkan data

⁴ Marwati Djoened Pusponugroho dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 387

⁵ Kasdi, Aminudin, "Kaum merah menjarah", *Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1960* (Surabaya: UNESA UNIVERSITY PRESS, 2014), Hal 4

⁶ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai pustaka, 2008) Hal 473-474

⁷ Ibid, Hal 6

⁸ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.M.H. & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H.S.E.M.M.M.HUM. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: PRENADA MEDIA GROUP. 2016. Hal 2

yang valid dengan kaidah-kaidah ilmiah yang harus dilalui dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan agar tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan untuk menjadi sebuah pengetahuan agar dapat memecahkan suatu masalah atau mengatasi masalah.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.¹⁰

1. Heuristik (Penelusuran Sumber Fakta)

Heuristik merupakan proses pengumpulan sumber-sumber, baik sumber primer maupun sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Sumber harus sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan sesuai dengan judul skripsi ini. Sumber primer merupakan sumber yang paling kuat. Sumber primer diperoleh dengan pencarian arsip atau dokumen yang mengungkap fakta tentang skripsi yang dikerjakan dengan judul "Peran GP Ansor dalam menjaga ketertiban di kota Jombang pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1965-1966". Peneliti sudah mendapatkan beberapa sumber seperti berikut:

a) Sumber Utama

Data atau informasi yang didapat dari pelaku sejarah baik berupa wawancara, dokumen, arsip, catatan-catatan, laporan pemerintah, kartu tanda keanggotaan organisasi. Peneliti menemukan sumber primer berupa dokumen atau arsip berupa laporan hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim Sejarah UNEJ dengan Narasumber para pelaku sejarah seperti orang Ansor yang terlibat dalam penumpasan PKI di Jombang, wawancara dengan anggota PKI, dan wawancara dengan pengurus NU Pusat yang terlibat pemberantasan PKI di kota Jombang tahun 1965-1966. Wawancara tersebut dilakukan pada bulan Juni-Juli tahun 2003. Kedepannya peneliti akan mencari sumber sebanyak-banyaknya untuk memperkuat penelitian ini sehingga menjadi karya yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti mencari arsip-arsip di museum NU untuk mengetahui tentang peran GP Ansor serta kontribusinya di kota Jombang pada tahun 1965-1966, lalu peneliti akan mencoba mencari sumber lain di kota Jombang seperti di kantor PWNU Kab Jombang untuk mencari informasi terkait berdirinya Ansor di Jombang dan perkembangannya. Selain itu peneliti tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan sumber sekunder sebagai pelengkap informasi pada penelitian ini.

b) Sumber Pendukung

1) Sumber buku

- KAUM MERAH MENJARAH (Aksi sepihak PKI dan BTI di Jawa Timur 1960-1965), Surabaya: UNESA UNIVERSITY PRESS, 2014

- Sejarah Nasional Indonesia VI (Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia +1942-1998). Jakarta: Balai Pustaka, 2008

- Palu Arit di Ladang Tebu: (Sejarah pembantaian massal yang terlupakan, Jombang-kediri 1965-1966) Pensil-324, 2011

2. Kritik (Menguji Sumber)

Pengujian sumber-sumber yang telah didapatkan agar dinyatakan layak sebagai bahan penelitian ini. Kritik sumber dibagi menjadi dua. Kritik Intern digunakan untuk

menguji isi sumber berupa arsip/Dokumen, sedangkan kritik Ekstern digunakan untuk menguji benda/seseorang (narasumber) yang di wawancarai. Setelah itu dilakukan pengujian validasi dan verifikasi untuk dapat digunakan dalam penelitian Peran GP Ansor dalam menjaga ketertiban di kota Jombang pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1965-1966

3. Interpretasi (Menganalisis Sumber)

Tahap interpretasi merupakan tahap penafsiran untuk menghubungkan sumber yang telah diperoleh dengan tema peneliti. Fakta harus relevan kemudian direkonstruksikan menjadi cerita sejarah yang sebenarnya.

4. Historiografi

Tahap yang terakhir dari penelitian sejarah adalah historiografi yaitu penulisan sejarah. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan ditafsirkan, direkonstruksi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan dalam bentuk Skripsi tentang "Peran GP Ansor di kota Jombang dalam menjaga ketertiban pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1965-1966"

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pusat GP Ansor di Jombang tahun 1964-1966

1. Profil Kabupaten Jombang

Jombang merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Timur, berada di tengah-tengah propinsi Jawa Timur. Letak geografis kota Jombang terletak antara 5.20° - 5.30° Bujur Timur, dan antara 7.20' dan 7.45' lintang selatan dengan luas wilayah 115.950 Ha. Kabupaten Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas utara, dan selatan pulau Jawa (Surabaya-Solo-Madiun-Yogyakarta), Jalur Surabaya-Tulung Agung, Serta jalur Malang-Tuban.

Jombang juga terkenal dengan sebutan kota Santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam/pondok pesantren di wilayahnya. Diantara pondok pesantren yang terkenal di Jombang diantaranya pondok pesantren Tebu Ireng, Denanyar, Tambak Beras, Peterongan (Rejoso).

Banyak tokoh bangsa Indonesia yang dilahirkan di kabupaten Jombang. Diantaranya adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-4 yaitu KH. Abdurrahman Wahid (GUS DUR), Pahlawan Nasional KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahid Hasyim.

2. Pusat GP Ansor di Jombang tahun 1964-1966.

Markas Pusat GP Ansor terbesar di kabupaten Jombang pada saat itu terletak di Parimono, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Tepatnya di selatan alun-alun kota Jombang, selatan pintu perlintasan rel kereta api.

Dan di setiap kecamatan di kabupaten Jombang terdapat ranting cabang GP Ansor di setiap daerah termasuk desa-desa. Salah satu ranting GP Ansor terletak di kecamatan Megaluh, kabupaten Jombang. Ketua GP Ansor kabupaten Jombang pada tahun 1965 adalah Syafi'i dan pembina atau penggerak Ansor di Jombang adalah Abah Afandi yang beralamat rumah di Jagalan, di wilayah sekitar pasar legi Jombang. Sedangkan Basis GP Ansor di Balongsari kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dipimpin oleh Pak Monari.

⁹ Ibid. hal 3

¹⁰ Kasdi Aminuddin. Memahami Sejarah. Surabaya. Unesa University Press. 2005. Hlm 10-11.

B. Awal mula organisasi GP Anzor di Jombang

GP Anzor di Jombang pada mulanya tahun 1951 bernama Pandu Anzor. Kegiatan Pandu Anzor bertujuan untuk menghimpun pemuda-pemuda NU atau islam untuk bersatu dan berkumpul dengan tujuan agar melatih kekompakan dan saling kerjasama antar sesama pemuda NU. Dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar atau mengerjakan kebaikan dan mencegah keburukan menurut agama islam. Selain itu pada saat masih bernama Pandu Anzor mereka melakukan gerakan kepanduan seperti kegiatan pramuka yaitu berkemah di alam bebas, melakukan pelatihan baris berbaris, berlatih bela diri, dan melakukan outbond agar menarik pemuda islam yang lain untuk bergabung dengan pandu Anzor karena kegiatannya tidak hanya berkaitan dengan keagamaan saja seperti mengaji, belajar nahwu sorof, dan melakukan shalat berjama'ah secara rutin melainkan juga melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti layaknya kegiatan pramuka yang seru dan tidak membosankan. Seragam yang digunakan oleh anggota Pandu Anzor masih sangat sederhana dengan memakai celana pendek. Selain itu Pandu Anzor juga memiliki kegiatan sosial seperti ikut menjaga keamanan dan ketertiban seperti apabila ada yang membutuhkan pengamanan apabila ada orang yang mempunyai hajatan. Itulah kepribadian yang ditanamkan pengurus Pandu Anzor yaitu kyai NU yang diajarkan kepada Pandu Anzor untuk saling toleransi dan hidup berdampingan di tengah masyarakat indonesia yang pluralisme dan mempunyai beranekam tradisi dan kebudayaan serta Pandu anzor bertujuan sebagai benteng ulama atau pelindung ulama yang akan selalu setia melindungi ulama dan kyai NU dari serangan pihak manapun termasuk orang-orang komunis. Seiring berjalanya waktu setelah tahun 1951 Pandu Anzor berganti nama menjadi Gerakan Pemuda Anzor atau yang lebih dikenal dengan GP Anzor.

C. Perkembangan GP Anzor tahun 1955-1966

GP Anzor pada mulanya bernama Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) yang didirikan pada tahun 1916 oleh ulama-ulama senior NU seperti KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Mas Mansur, H. Abdul Kahar. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan islam, pembentukan kader dan pembinaan mubaligh. Lalu setelah mendapatkan badan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda. Nahdlatul Wathan berhasil mendirikan cabangnya diberbagai daerah seperti di Gresik, Sidoarjo, Malang bahkan sampai ke Jawa Tengah. Nahdlatul Wathan berulang kali mengalami pergantian nama organisasi mulai dari Nahdlatul Wathan Tahun 1916, lalu kemudian Taswirul Afkar tahun 1918, lalu berubah menjadi Dakwatus syubban, lalu menjadi Syubatul Wathan (Pemuda Tanah Air) pada tahun 1924. Setelah itu Da'watus Syubban dan Syubbanul Wathan dipersatukan oleh KH. Wahab Hasbullah dan menjadi Nahdlatul Syubban (Kebangkitan Pemuda), tahun 1931 berubah menjadi Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama (PPNU), tahun 1932

diubah menjadi PNU (Pemuda Nahdlatul Ulama), dan PNU berubah menjadi ANO (Anzor Nahdlatul Oelama) pada tahun 1934. Setelah itu Anzor mengalami kemunduran akibat dari penjajahan Jepang pada tahun 1942-1945. ANO mulai aktif kembali setelah kemerdekaan pada tahun 1949 dengan nama baru yaitu Gerakan Pemuda Anzor (GP Anzor) yang bertahan hingga saat ini.

GP Anzor di jombang pada tahun 1951 masih bernama Pandu Anzor, lalu setelah tahun 1951 berganti nama menjadi GP Anzor. GP Anzor sendiri merupakan organisasi kepemudaan NU dan setiap pimpinan GP Anzor di jombang merupakan kyai-kyai NU maupun anggota-anggota NU senior. GP Anzor mempunyai pasukan yang bernama BANSER (Barisan Anzor Serbaguna). Perbedaan antara GP Anzor dan BANSER terletak pada peran dan fungsinya serta struktur kepengurusan yang ditempatinya. GP Anzor merupakan orang-orang kantor yang mengatur administrasi serta menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Anzor dan sekaligus pembina BANSER, sedangkan BANSER adalah tentaranya GP Anzor/ Pasukan dari GP Anzor yang bertugas dilapangan untuk mengamankan situasi di tengah-tengah masyarakat terutama dari serangan PKI. Untuk menjadi anggota dari GP Anzor adalah orang-orang pilihan atau terpilih karna dibaiat langsung oleh Kyai-kyai NU dan sebelum berkonfrontasi melawan PKI, Pemuda Anzor terlebih dahulu diisi bacaan-bacaan/amalan-amalan oleh para kyai agar kebal dari serangan PKI. GP Anzor harus siap mati melawan pemuda Rakyat PKI. Kebanyakan anggota GP Anzor berasal dari orang-orang santri (semua santri NU) atau orang yang mempunyai ilmu agama lebih dalam daripada orang-orang lain pada umumnya.¹¹

D. Tujuan dan Fungsi GP Anzor di Jombang tahun 1964-1966

Tujuan dan fungsi GP Anzor adalah menjaga atau menjamin keselamatan ulama/kyai-kyai NU dari bahaya yang mengancam termasuk dari musuh NU sendiri yaitu PKI. Kegiatan GP Anzor sebelum meletusnya peristiwa G 30S/PKI tahun 1965 adalah dengan cara memperkuat organisasi agar tidak kalah dengan PKI. NU dan PKI merupakan dua dari empat partai politik yang memenangkan pemilu pada tahun 1955. Setelah itu mereka bersaing secara keras untuk merebut pengaruh terhadap rakyat Indonesia. Berbagai kampanye secara besar-besaran dilakukan oleh PKI dan NU termasuk dengan menggerakkan organisasi kepemudaan yang mereka punya. Dikubu NU mempunyai GP Anzor beserta BANSERnya sedangkan dipihak PKI dengan Pemuda Rakyatnya. Ketika bertemu kedua kubu saling berteriak, berorasi dan menyanyikan yel-yel andalanya. Dipihak PKI menciptakan kesenian LEKRA dan menyanyikan lagu genjer-genjer yang mempunyai makna penderitaan yang dirasakan oleh kaum bawah seperti buruh tani, orang melarat yang hidup dengan ketidakadilan dan menganggap orang-orang kaya yang mempunyai harta sebagai orang kapitalis atau penindas orang miskin. Sedangkan di pihak GP Anzor menciptakan seni budaya yang diberi nama LESBUMI (Lembaga Seni dan Budaya Nahdlatul Ulama) yang

¹¹ Abdul Wahab (BANSER SENIOR), Wawancara, Jombang, 22 Juni 2020.

kegiatannya adalah berdakwah, mengadakan perkumpulan dan memberikan pengetahuan tentang kisah perjuangan nabi dalam menyebarkan agama islam, cerita-cerita arab, perjuangan wali songo dalam menyebarkan agama islam di nusantara, mengumandangkan sholawat-sholawat yang tujuannya agar pemuda Ansor mempunyai keimanan yang kuat dan menangkalkan paham komunis yang bertentangan dengan NU dan Agama.

A. Lahirnya Faham Komunis di Indonesia

Faham Sosial Demokrat (Komunis) pertama kali dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda yang bernama H.J.F.M Sneevliet pada tahun 1913. Kemudian pada tahun 1914 Sneevliet mendirikan Indische Sosial Democratische Vereeniging (ISDV) "Ikatan Sosial Demokrat Indonesia". Partai beraliran kiri ini pada awalnya merupakan partai kecil yang semua anggotanya merupakan orang-orang Belanda. Namun ISDV ini ternyata berkembang cepat di Indonesia. ISDV kemudian menjadi partai komunis pertama terbesar diluar Uni Soviet. Sejak revolusi Rusia tahun 1917, ISDV telah menjadi badan komunis yang lebih nyata. Pada akhir tahun 1917 ISDV telah menghimpun 3.000 serdadu dan kelas kedalam Soviet-soviet (Dewan-Dewan) terutama di kota pelabuhan di Surabaya. Selama tahun 1918-1919 Pemerintah Hindia Belanda membubarkan dewan dewan tersebut, mengasingkan Sneevliet dan menahan sebagian besar orang Belanda yang terlibat dalam organisasi ini dan orang-orang Belanda yang menjadi pimpinan partai ini. Akan tetapi ketika orang-orang Belanda yang radikal ini hilang. ISDV dipimpin oleh orang-orang Indonesia, dan dengan cepat partai ini mempunyai basis massa yang besar. Berbagai kasus yang menjerat tokoh-tokoh SI membuat SI kehilangan kepercayaan dari masyarakat karna kartu-kartu anggota SI banyak yang dicekal dan akan membawa pada kesulitan. Dibawah pimpinan Semaun dan Darsono Notosudirdjo (1893-1976), Organisasi ini masih sangat kecil (Jumlah anggotanya 269 orang pada tahun 1920), tetapi sekarang sebagian besar anggotanya adalah orang Indonesia. Pada bulan Mei 1920, organisasi ini berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Pada tahun 1924 namanya berganti lagi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

B. Pemberontakan-pemberontakan PKI di Indonesia

1. Pemberontakan PKI terhadap pemerintah Hindia Belanda tahun 1926
2. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948
3. Pemberontakan G 30S/PKI tahun 1965

C. Awal Kemunculan PKI di Jombang Sebelum Peristiwa G30S/PKI Tahun 1965

Sebelum meletusnya percobaan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia dan juga Ideologi Pancasila Oleh PKI pada tanggal 30 September 1965, PKI merupakan salah satu partai besar yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu tahun 1955. PKI berada di urutan ke empat besar setelah PNI, Masyumi, dan NU. Sehingga PKI pada saat itu menjadi partai yang legal dan memiliki basis massa yang besar di Indonesia. Seperti layaknya partai politik pada umumnya, PKI juga mempunyai Cabang-Cabang kepengurusan di daerah-daerah di seluruh

Indonesia termasuk Jombang Jawa Timur. Sebagai partai yang tidak bertuhan, paham-paham PKI sangat berseberangan dengan partai islam di Indonesia seperti Masyumi dan NU, sehingga sering terjadi persinggungan dan bentrokan antar kedua pendukung partai yaitu NU dan PKI. PKI menganut paham aliran Sosial Demokratis yang merupakan buah pemikiran dari Marx. Paham ini sangat bertentangan dengan paham liberalis sehingga dianggap cocok oleh PKI untuk diterapkan di Indonesia. Tujuan PKI adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas di Indonesia, dengan menganut asas sama rasa sama rata. Sasaran dari strategi politik PKI adalah masyarakat kelas bawah di Indonesia yang kebanyakan adalah petani kecil dan buruh. Dan sasaran dari PKI yang harus di hancurkan adalah kekuatan-kekuatan besar yang berseberangan dengan PKI atau yang menghalang-halangi untuk mencapai tujuan PKI merebut kekuasaan pemerintahan Indonesia, termasuk salah satunya adalah NU yang merupakan partai islam yang besar di Indonesia. NU merupakan musuh besar bagi PKI dikarenakan NU selalu menolak peraturan-peraturan PKI dan rencana yang akan dilakukan oleh PKI, seperti contoh NU menolak aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI tentang kepemilikan tanah atau lahan setelah diberlakukannya UUPA NO 5/1960. Perseteruan antara PKI dan NU juga menjadi perseteruan antara PKI dan GP Ansor karna musuh NU juga menjadi musuh GP Ansor. Perseteruan antara PKI dan GP Ansor juga terjadi di Jombang, Jawa Timur.

Markas PKI di Jombang, Jawa Timur, terletak di Sofi atau kalau sekarang tempat itu menjadi icon tugu lambang ciri khas dari kabupaten Jombang yaitu tugu atau Monumen Ringin Conthong yang terletak di Pusat kota Jombang, tepatnya di Jl. KH. Wahid Hasyim No.1, Jombang, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur. Selain itu PKI juga mempunyai cabang di setiap kecamatan di Jombang dan mempunyai anak cabang di setiap desa-desa yang ada di Jombang. Salah satu contohnya adalah anak cabang PKI yang berada di desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Ketua PKI di desa Balongsari tersebut bernama Subari. Cara paham Komunis masuk kepada orang-orang di desa-desa seperti halnya pencucian otak oleh paham-paham radikal kepada oknum-oknum teroris pada umumnya. Pimpinan PKI di desa Balongsari tersebut pada awalnya beragama islam dan dia terpengaruh oleh ajaran PKI, dan akhirnya desa Balongsari menjadi basis massa terbesar PKI di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Strategi PKI untuk menarik simpati rakyat di desa-desa di kabupaten Jombang adalah dengan memberikan janji-janji kemakmuran dan hidup sejahtera, dengan membentuk koperasi dan membagikan sembako (beras, minyak goreng, gula dll) untuk menarik perhatian rakyat kecil agar mau masuk menjadi anggota PKI. Setelah mempunyai basis massa yang besar, PKI melancarkan aksi sepihaknya dengan menggerakkan buruh dan tani anggotanya tersebut untuk merampas sawah-sawah orang kaya dan dibagi-bagikan kepada orang miskin atau buruh tani. Tindakan tersebut mendapat penolakan dan perlawanan oleh orang-orang Non Komunis seperti orang-orang PNI, orang-orang agamis termasuk NU, karna menurut NU hal itu sudah mendholimi orang lain karna merampas harta orang lain dengan cara yang tidak halal.

Dan orang-orang kaya tersebut, termasuk orang NU melakukan perlawanan dengan aksi sepihak PKI karna kekayaan yang dimiliki orang-orang non PKI merupakan hasil kerja keras mereka dan mendapatkannya secara halal. Maka orang-orang non PKI tersebut tidak terima jika hartanya dirampas paksa oleh PKI. Oleh akibat dari aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI tersebut, keadaan menjadi tidak kondusif dan sering terjadi perkelahian antara pemilik lahan yang sah dengan PKI yang akan menyerobot lahan tersebut. Tidak jarang juga perkelahian tersebut melibatkan pemuda Ansor dan PKI karena sawah dari orang-orang NU menjadi sasaran penjarahan oleh PKI, sehingga dari perkelahian dan bentrokan tersebut mengakibatkan jatuh korban bahkan sampai ada yang tewas dalam kejadian itu, baik dari orang-orang PKI maupun orang-orang Ansor. Kejadian itu terus menerus berlangsung sampai terjadinya peristiwa G 30S/PKI tahun 1965.

A. Situasi dan Kondisi kabupaten Jombang pasca peristiwa G 30S/PKI tahun 1965

Situasi dan kondisi di kabupaten Jombang pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1965 sama seperti daerah lain di Indonesia yaitu genting dan rawan. Di Jombang para pemuda Ansor mendapatkan instruksi langsung dari KH. Yusuf Hasyim yang merupakan pimpinan pusat GP Ansor/ketua GP Ansor pusat di Jakarta. KH. Yusuf Hasyim merupakan putra daerah kabupaten Jombang. KH. Yusuf Hasyim menginstruksikan untuk melakukan pembersihan PKI di Jombang. Setelah itu terjadi pembakaran gedung CC PKI yang terletak di depan Kodim Jombang, yang sekarang gedung tersebut menjadi rumah makan Warung Apung Rahmawati. Berbagai fasilitas dan infrastruktur milik PKI dibakar oleh Pemuda Ansor dan warga NU, seperti gedung Bapergi yang terletak di tempat penjualan daging di pasar legi Jombang. Tidak hanya itu, organisasi yang berafiliasi dengan PKI juga terkena imbasnya seperti yang terjadi di Jl. Hamka Gedung milik orang cina yang berafiliasi dengan PKI direbut oleh GP Ansor dan orang-orang pesantren atau pondok dan sekarang gedung tersebut menjadi Universitas Darul Ulum (UNDAR). Situasi PKI yang semakin terdesak membuat PKI tidak dapat melakukan perlawanan dan bersembunyi di daerah-daerah terpencil seperti di kebun-kebun kosong dan lahan kosong yang terletak di pinggir kota Jombang.

B. Peranan GP Ansor dalam menjaga ketertiban di kabupaten Jombang pasca peristiwa G 30S/PKI

Dalam situasi yang sangat rawan pada tahun 1965, orang-orang Ansor setiap malamnya selalu berjaga-jaga terutama di depan pondok pesantren dan rumah-rumah para kyai di Jombang, seperti yang terjadi di rumah Kyai Bisri Cholil di Rejoso yang plang namanya didepan rumah dicopot oleh pemuda Ansor agar tidak menjadi sasaran orang-orang PKI dan kyai tersebut aman. Peristiwa G 30S/PKI menjadi titik balik pembalasan orang islam yang sebelum peristiwa tersebut selalu didzolimi oleh orang-orang PKI. Alasan GP Ansor menumpas PKI yang berada di Jombang karna trauma dengan peristiwa Madiun tahun 1948, karna pada peristiwa Madiun banyak para kyai yang dibunuh secara keji oleh orang-orang PKI dan bukan

tidak mungkin peristiwa tersebut bisa terulang kembali. Setelah peristiwa G 30S/PKI, terjadi kemesraan hubungan antara TNI AD dan NU yang bersatu untuk menumpas PKI. Sinergi antara TNI AD, NU, dan Ansor semakin jelas terlihat saat melakukan apel siaga bersama di alun-alun Jombang. Semua komponen tersebut bersatu untuk mengambil alih kantor-kantor PKI dan Fasilitas PKI. Pusat komando GP Ansor terbesar terletak di Jagalan Jombang yang menjadi pusat koordinasi Ansor di seluruh Jombang. Dalam perlawanan melawan PKI, yang diperbolehkan ikut menumpas adalah pemuda Ansor yang usianya minimal setara SMA dan anak kecil dimasukkan kedalam rumah agar keamanannya terjaga. Pada saat itu mushola-mushola penuh untuk berlindung umat islam. Pada saat itu posisi PKI semakin terdesak dan kekuatan NU dan Ansor semakin besar. Banyak orang-orang PKI yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari NU/Ansor untuk menyelamatkan diri dari serangan orang Ansor, tapi Orang-orang NU dan GP Ansor asli tidak mudah percaya dengan orang PKI tersebut. Orang PKI tersebut tertangkap dan diangkut oleh pemuda Ansor untuk kemudian dieksekusi di tempat sepi atau diserahkan kepada TNI AD, tetapi ada juga orang PKI yang lolos dari operasi GP Ansor dan bertaubat lalu masuk NU dan diterima oleh masyarakat. Peranan GP Ansor pasca G 30S/PKI adalah untuk menjaga umat islam, pondok pesantren dan rumah-rumah kyai dan masyarakat NU, membuat posko-posko atau tempat-tempat siaga. GP Ansor akan mulai menyerang PKI apabila ada perintah dari Kyai-kyai/sesepuh, apabila mendapat perintah maka orang Ansor akan berangkat ke tempat yang diduga terdapat keberadaan PKI. Pemuda Ansor menyerang PKI di perkebunan yang menjadi tempat persembunyian, karna apabila tidak diserang maka PKI akan menyusun strategi untuk menyerang GP Ansor. Orang-orang Ansor yang tua tidak ikut menyerang dan hanya membantu finansial dan materi. Masyarakat menyambut baik terhadap peran Ansor hal itu terbukti dengan memberikan suguhan makanan terhadap orang ansor yang melakukan pengamanan di Jombang Setelah tahun 1966 operasi penumpasan dihentikan oleh militer/Kodam brawijaya, keadaan Kabupaten Jombang semakin kondusif. Dan GP Ansor melakukan pembinaan organisasi dan mengadakan pawai-pawai Drum band untuk menandai kebangkitan NU dan GP Ansor.

C. Dasar Hukum Penumpasan Anggota PKI

Pada pukul 18.00 Gedung RRI Pusat telah direbut oleh RPKAD, satu jam kemudian Pangkostrad Mayjen Suharto mengumumkan bahwa G 30S/PKI 1965 adalah kontra revolusi sebagai berikut.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT PENGUMUMAN

No, 002/Peng/Pus/1965

Dengan ini diumumkan bahwa:

1. Telah ada pengertian kerjasama dan kebulatan penuh antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian untuk menumpas gerakan kontra revolusioner dari apa yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September".

2. Dengan diumumkan apa yang mereka sebut “Dewan Revolusi Indonesia” dan menganggap bahwa kabinet Dwikora telah demisioner maka jelas orang-orang Gerakan 30 September adalah orang-orang kontra revolusioner yang telah melakukan pengambilalihan kekuasaan negara Republik Indonesia dari tangan P.J.M Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, disamping mereka telah melakukan penculikan terhadap beberapa Perwira Tinggi Angkatan Darat.

3. Masyarakat diharap tenang dan tetap waspada dan siap siaga.

Jakarta, 1 Oktober 1965
Pimpinan Sementara Angkatan Darat
Republik Indonesia
Ttd,
SOEHARTO
Mayor Djenderal TNI

Setelah itu pada tanggal 2 Oktober 1965 Soekarno menunjuk Mayjen Soeharto sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtip) berdasarkan keputusan presiden nomor 162/KOTI/1965 Tanggal 1 November 1965. Keppres No. 142/KOTI/1965. Kemudian disempurnakan dengan 179/KOTI/1965 dengan tugas pokok memulihkan ketertiban dan keamanan dari akibat-akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 serta mengembalikan kewibawaan pemerintah pada umumnya, dengan jalan operasi fisik-militer dan mental.

Secara garis besar, tugas-tugas operasional keamanan dan ketertiban yang diemban oleh Kopkamtip sebagai berikut.

1. Operasi militer, yaitu pengerahan pasukan untuk menumpas secara fisik pemberontakan G 30S/PKI.
2. Operasi intelijen untuk mendukung operasional di lapangan.
3. Operasi teritorial untuk membina wilayah dalam rangka tercapainya ketahanan nasional.
4. Operasi sosial politik, untuk mendukung operasi teritorial dan keamanan guna menetralkan dampak negatif terjadinya pemberontakan G 30S/PKI.
5. Operasi Yustisi, guna menyelesaikan secara hukum yang terlibat G 30S/PKI.

Pada tanggal 2 Oktober juga, pimpinan muda NU, H.M Subchan ZE, membentuk organisasi “Komando Aksi Pengganyangan Kontra Revolusioner Gerakan 30 September” disingkat KAP GESTAPU.

D. Sikap NU terhadap Instruksi Soeharto dalam menghadapi G30S/PKI

Penumpasan PKI oleh GP Ansor diawali dengan meminta restu kepada partai NU, karna NU merupakan induk organisasi yang membawahi GP Ansor dan fatwanya menjadi patokan pemuda Ansor untuk menentukan sikap.

Akhirnya NU selaku induk organisasi dari GP Ansor dan organisasi-organisasi lain dibawah naungan NU mengeluarkan surat keputusan yang intinya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Memutuskan kepada Presiden Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi agar dalam tempo yang

sesingkat-singkatnya membubarkan Partai Komunis Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani, dan Serikat Umum Pekerja Umum/Sobsi, serta ormas lainnya yang ikut mendalangi dan bekerjasama dengan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.

2. Memohon kepada Presiden Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi agar mencabut izin terbit semua surat kabar/media publikasi lainnya yang langsung atau tidak langsung telah membantu apa yang menamakan dirinya gerakan 30 September.

3. Menyerukan kepada segenap umat islam dan kekuatan revolusioner lainnya untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada ABRI di dalam usahanya untuk melaksanakan perintah presiden Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi dalam menyelesaikan /menertibkan kembali segala akibat yang ditimbulkan oleh Gerakan 30 September

Jakarta, 5 Oktober 1965

PB. Partai Nahdlatul Ulama.
pp. Muslimat Nahdlatul Ulama.
PP. Sarbumusi.
PP. Fatayat.
PP. Lesbumi.
PP. GP Ansor.
PB. PMII.
PP. Pertanu.
PP. Sernemi.

Merujuk pada surat keputusan PBNU maka GP Ansor segera mengeluarkan perintah kepada seluruh pemuda Ansor yang ada di Indonesia melalui surat Pernyataan Pucuk Pimpinan GP Ansor atas Gerakan 30 September 1965, sebagai berikut:

**PERNYATAAN
PUCUK PIMPINAN GP ANSOR
atas
GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965**

**PERNJATAAN
No. Ist/PP/1965.-**

BISMILLAHIROHMANIRROCHIM

Berhubung dengan terjadinya tindakan kontra revolusioner dari apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September” untuk merebut kekuasaan negara dari tangan presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pahlawan Islam dalam kemerdekaan pada tanggal 30 September 1965 malam. Maka pucuk pimpinan Gerakan Pemuda Ansor menyatakan:

1) Tetap tegak berdiri di belakang Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pahlawan Islam dari kemerdekaan Bung Karno.

2) Menentang tindakan kontra revolusi yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”.

3) Menginstruksikan kepada segenap anggota, Kader-kader dan Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta raya khususnya dan di seluruh tanah air umumnya agar:

a) Mempertinggi kewaspadaan dengan menjauhkan diri dari provokasi-provokasi yang dapat menyeret Gerakan Pemuda Ansor ke dalam aksi-aksi kontra revolusioner “Gerakan 30 September”.

b) Supaya terus menerus mengadakan kontak dengan pimpinan atasan dan dengan alat-alat negara yang menentang gerakan kontra revolusioner tersebut, untuk setiap waktu menunaikan tugas-tugas revolusi dan kewajiban agama islam.

4) Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor dalam situasi yang bagaimanapun akan tetap setia pada garis-garis revolusi pada tegaknya lima azimat revolusi dan kepada ajaran-ajaran agama islam.

Jakarta, 1 Oktober 1965¹²

Gerakan Pemuda Ansor

Ketua II Sekretaris Umum,

Ttd. Ttd.
(Jahja Ubaid SH.) (H.A Chalid Mawardi.)

Setelah beredarnya surat keputusan dari Pucuk Pimpinan GP Ansor, seluruh pemuda ansor diberbagai daerah di Indonesia melakukan penumpasan atau pembersihan terhadap anggota PKI dan simpatisanya.

E. Pelaksanaan Operasi Bersama (TNI AD/NU/GP ANSOR) dalam menumpas PKI di kabupaten Jombang

Penumpasan PKI di kabupaten Jombang difokuskan pada wilayah-wilayah yang menjadi Basis PKI atau pengaruh PKI nya yang paling besar. Beberapa wilayah yang merupakan basis PKI di kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: Jombang kota (Kecamatan Jombang), Kec. Sumobito, Kec. Megaluh, Kec. Peterongan, dan Kec. Bandar kedungmulyo.

Seperti penumpasan yang terjadi di Jombang kota. Penyebabnya adalah selain (UUPA) yang merupakan ide dari PKI untuk menyerobot tanah secara sepihak yang membuat tuan tanah marah karena merasa di dzolimi oleh PKI. Penyebab lain adalah adanya isu penculikan kyai-kyai NU yang akan dilakukan oleh PKI. Bermula dari adanya pameran senjata di Alun-alun Jombang. PKI mempunyai rencana untuk menculik kyai-kyai dengan dinaikkan helikopter secara gratis dan diajak muter-muter kemudian setelah jauh mereka (kyai-kyai) tersebut akan dibunuh. Namun isu tersebut tidak terjadi karena informasinya bocor dan diketahui oleh pemuda NU/GP Ansor. Setelah itu GP Ansor melakukan pembalasan dengan membunuh orang-orang PKI. Penumpasan anggota PKI dilakukan dengan cara melakukan penggerebekan dirumah anggota PKI yang sudah dicari tau data-datanya melalui polres dan polsek setempat sehingga tidak akan salah sasaran, kemudian orang PKI tersebut dibawah kesuatu tempat, alah satunya di kebon tebu kemudian dibantai. Instruksi dalam operasi Ansor di Kabupaten Jombang mempunyai beberapa versi diantaranya adalah bahwa adanya oknum anggota GP Ansor yang nekad melakukan operasi dan membunuh

anggota PKI tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada kyai dan pimpinan NU. Terutama anggota Ansor yang masih muda yang emosinya masih belum stabil.

Wilayah-wilayah yang terjadi penumpasan PKI di Jombang adalah sebagai berikut:

1) Desa Kejambon dan Desa Sengon, Kec. Jombang.

Selain atas dasar agama untuk melakukan penumpasan terhadap orang PKI, juga didasari sengketa tanah. Sawah-sawah milik warga NU diserobot dan padi yang hampir panen dibabati anggota BTI sehingga warga NU meminta bantuan daerah lain yang mempunyai basis NU dan Ansor yang lebih besar, yaitu ke pak Haji Pandi dan Pak Hanik. Lalu Pak Haji Pandi dan Pak Hanik mengumpulkan anggota Ansor untuk membantu warga muslim di Sengon untuk mencabuti patok-patok tanah yang dipasang oleh PKI. Pihak PKI tidak terima maka terjadilah perkelahian massal antara pemuda Ansor dan orang PKI yang menyebabkan korban luka dan tewas.¹³

2) Desa Pulo, Kec. Jombang

Aksi tersebut dilakukan oleh Bapak Mukhtar dan kawan-kawanya. Bapak Mukhtar, Nawawi, Khudori, Nur syam dan kawan-kawan dari GP Ansor ranting desa Pulo berangkat dengan restu Kyai, salah satunya Haji Pendi, kemudian melakukan operasi pembunuhan-pembunuhan sekitar Jombang sampai dengan Kertosono. Di Kertosono operasi dilakukan di depan PG.Lestari diakukan pada akhir bulan Oktober sampai awal Desember.

3) Desa Balongsari Kec. Megaluh

Konflik antara PKI dan GP Ansor di Kec. Megaluh disebabkan oleh Landreform atau perampasan tanah oleh PKI kepada tuan tanah sebagai kebijakan yang dilakukan oleh PKI untuk menciptakan kemakmuran bersama dan tidak ada kesenjangan ekonomi secara vertikal. Dipihak tuan tanah, aksi tersebut mendapat penolakan dikarenakan semua hasil kekayaannya adalah hasil dari kerja keras mereka sendiri dan modal yang mereka keluarkan dan diperoleh tanpa melanggar hukum. Dan tiba-tiba PKI menerapkan peraturan dengan menumpang UUPA NO 5/1960 untuk merampas tanah-tanah tuan tanah dan membagi-bagikan kepada masyarakat kelas bawah seperti buruh tani dan orang miskin. Hal itu menyebabkan pertikaian antara orang PKI dan Simpatisanya berhadapan dengan Tuan tanah kebanyakan orang-orang NU, PNI yang dibela oleh GP Ansor karena orang PKI melakukan aksi sepihak dan merampas tanah yang bukan haknya membuat kemarahan yang besar dari kalangan agamis dan GP Ansor. Dalam melakukan penumpasan, GP Ansor dibagi menjadi beberapa kelompok dan mempunyai tugas dan peran yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang bertugas untuk mengambil target orang-orang PKI, ada yang bagian eksekutor dan ada yang bagian penginstruksi di kantor GP Ansor. GP Ansor menculik anggota PKI pada malam hari dan dikumpulkan di suatu tempat yang sepi untuk dilakukan eksekusi, biasanya tempat yang dijadikan untuk melakukan eksekusi anggota PKI adalah disepanjang aliran sungai brantas atau diladang tebu yang luas. Di wilayah Kec. Megaluh sendiri tempat pengekskusion orang-orang PKI

¹² Arsip Museum NU, “Pucuk Pimpinan GP Ansor atas gerakan 30 September 1965.”, Nomor B420090020,2

¹³ Ibid, Hal 51-52

adalah di sebelah barat sungai brantas sampai ke Kertosono, Nganjuk. Dalam penumpasan PKI, GP Ansor di Megaluh mengeksekusi orang PKI yang melawan dan membuat kekacauan sedangkan orang PKI yang tidak melawan, ditangkap dan diamankan untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum atau TNI AD.

Penumpasan anggota PKI di Jombang secara keseluruhan relatif rendah daripada daerah lain seperti di Kediri, Jawa Timur. Hal itu dikarenakan basis PKI terbesar terletak di Jengkol, Kediri. Bahkan banser Jombang dikirim untuk ikut membantu dalam melakukan penumpasan PKI di Kediri, Jawa Timur. Penumpasan anggota PKI di Jombang akhirnya berhenti pada Januari 1966 atas perintah Pangdam VIII agar kampanye penumpasan PKI diberhentikan dan massa NU berdiri dibelakang ABRI. Maka berhentilah massa NU dan GP Ansor sebagai barisan terdepan dalam penumpasan PKI di Jombang dan diserahkan sepenuhnya kepada ABRI dan pemerintah RI.

F. Cara memperlakukan keluarga Ex anggota PKI setelah peristiwa pembersihan PKI di Jombang tahun 1965-1966

Pemberantasan PKI di Jombang dibagi menjadi dua periode berdasarkan skala/intensitasnya. Periode pertama antara Oktober 1965 hingga Januari 1966 dan periode kedua antara Januari hingga Agustus 1966. Periode pertama ditandai dengan operasi-operasi yang intens dengan jumlah yang besar dan pada periode kedua ditandai dengan operasi-operasi yang lebih kecil dan mulai menurun. Pada periode kedua ini, situasi keamanan di dalam masyarakat mulai stabil, tidak ada lagi operasi-operasi penumpasan anggota PKI yang dilakukan oleh GP Ansor dan TNI AD. Orang-orang Ex PKI yang lolos dari operasi penumpasan mulai tenang dan perlahan-lahan memeluk agamanya kembali dan mempercayai adanya tuhan. Mereka (orang-orang Ex PKI) sudah tidak berani melakukan tindakan radikal di dalam masyarakat dan harus lapang dada menerima cacian dan cemo'ohan dari masyarakat sebagai bentuk sanksi sosial atas keterlibatannya sebagai mantan anggota PKI. Selain sanksi sosial pemerintah dibawah kepemimpinan presiden Soeharto juga mengeluarkan peraturan pemerintah yang berisi tentang larangan bagi orang-orang yang terlibat menjadi anggota PKI untuk menjadi abdi negara atau pejabat pemerintahan/PNS. Berdasarkan KEPPRES NO 28 Tahun 1975, tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G 30 S/PKI Golongan C. Golongan C adalah mereka yang terlibat atau diduga terlibat secara tidak langsung dalam peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI. Golongan C dibagi menjadi tiga, yaitu: 1.) C1, pernah terlibat dalam peristiwa Madiun dan setelah terjadinya peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI, baik dalam tindakan maupun ucapan-ucapan cenderung untuk senantiasa menguntungkan sisa-sisa G 30S/PKI., 2.) C2 adalah golongan yang menjadi anggota biasa bekas organisasi massa yang terlarang yang seazas, bernaung/berlindung dibawah bekas PKI., 3.) C3 golongan yang bersimpati dengan G 30S/PKI melalui sikap lahir, perbuatan-perbuatan atau tulisan-tulisan tapi tidak jelas perannya dalam kegiatan fisik didalam peristiwa pemberontakan G 30S/PKI. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1, Apabila mereka termasuk golongan C perlu dilakukan penangkapan dan

penahanan untuk diproses lebih lanjut, maka perlu segera diadakan penyelesaian sesuai dengan Pasal 3 dan 4 keputusan presiden ini. Pasal 2 ayat 2, apabila mereka yang termasuk golongan C itu berstatus pegawai negeri sipil, mereka dapat diberhentikan sementara (Diskors) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak saat penahanannya sampai penentuan penggolongannya. Lalu langkah selanjutnya berdasarkan Pasal 4, maka terhadap pegawai negeri termasuk pegawai/karyawan di perusahaan milik negara yang termasuk golongan C dikenakan tindakan Administratif sebagai berikut:

- a) Yang termasuk golongan C1 diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri.
- b) Yang termasuk golongan C2 dan C3 dapat dikenakan tindakan administratif lainnya dengan memperhatikan berat ringannya keterlibatan mereka.

Berdasarkan KEPPRES NO 28 Tahun 1975 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto yang berlaku diseluruh Indonesia, membuat keluarga EX anggota PKI/keluarga orang yang terlibat PKI tidak dapat menjadi pejabat pemerintahan dan apabila ada PNS yang terindikasi mempunyai kerabat/keluarga yang terlibat dalam peristiwa G 30S/PKI maka langsung dicopot secara tidak hormat. Hal ini juga terjadi di kabupaten Jombang, tepatnya di kecamatan Mojowarno atas pelaporan lingkungan tidak bersih An.Chairil Hariya Udaya SH. (Camat Mojowarno) yang dilaporkan oleh Bupati Jombang dan ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dalam laporan tersebut berisi tentang:

- Sdr. Chairil Hariya Udaya SH. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mojowarno, mempunyai mertua yang terlibat G 30S/PKI.
- Sdr. Chairil Hariya Udaya SH. Tidak diadakan pergeseran mengingat selama menjabat sebagai Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mojowarno, tidak pernah menampakkan hal-hal yang bersifat negatif bahkan mendapatkan penilaian yang positif dalam membina Wilayahnya sehingga dapat meraih juara umum dalam penerimaan panji-panji pembangunan tahun anggaran 1987-1988. Disamping itu dipertimbangkan pula bahwa orang tuanya adalah purnawirawan ABRI yang tidak pernah cacat dalam kariernya.
- Sdr. Chairil Hariya Udaya SH. Menunjuk pejabat sementara Kepala Desa Mojowangi bukan karena mengorbitkan Sdr.Soegiono (Sekdes Mojowangi) tetapi karena Kepala Desa Mojowangi. Sdr.Soedarsono SK. Mendapat sohorsing dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang dalam masalah penyalah gunaan uang PBB dan masalah lainnya.

Memang benar bahwa Sdr.Soegiono pejabat sementara Kepala Desa Mojowangi, Kec. Mojowarno lingkungannya tidak bersih, sebab orang tuanya bernama Sdr.Joetrisno Ex TNI Ad terlibat G 30S/PKI Klasifikasi B terbukti terdapat dalam OT Kartotik Nomor Urut 080.

Namun demikian bila permasalahan atau sohorsing atas diri Sdr.Soedarsono SK. Kepala Desa Mojowangi sudah terselesaikan maka untuk selanjutnya Sdr. Sugiono

(SekDes Mojowangi) akan kami proses sesuai dengan prosedur yang ada.¹⁴

Seperti itu lah keadaan keluarga Ex anggota PKI didalam kehidupan bermasyarakat setelah pembubaran partai PKI tahun 1966, dan pembersihan lingkungan dari hal-hal bekas keluarga anggota PKI sampai tahun 1988 yang dilakukan oleh presiden Soeharto. Meskipun keluarga Ex anggota PKI tidak dapat berpartisipasi sebagai pejabat pemerintahan republik Indonesia, setidaknya mereka sudah dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan hidup secara damai. Peristiwa Gestapu dijadikan sebagai pelajaran berharga agar tidak terulang kembali dimasa yang akan mendatang.

Penutup

A. Kesimpulan

Gerakan Pemuda Ansor atau dikenal dengan GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan NU. GP Ansor didirikan pada tanggal 14 desember 1949 dan Chamid Widjaja sebagai ketua umum pertama periode 1949-1954 dan berkembang sampai sekarang.¹⁵ GP Ansor bertugas untuk mengawal keamanan tokoh-tokoh NU dan organisasi NU dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan tokoh-tokoh, kyai-kyai NU bahkan yang mengancam kedaulatan NKRI. Salah satu peristiwa sejarah terbesar di indonesia dan mengancam kedaulatan NKRI adalah peristiwa G 30S/PKI tahun 1965 Masehi. Peran GP Ansor di kabupaten Jombang pasca G 30S/PKI sangat dominan, diantaranya adalah 1) melakukan penjagaan terhadap rumah-rumah Kyai, Pondok Pesantren dan rumah warga NU di Jombang agar tidak menjadi sasaran orang-orang PKI, karna pada saat itu keadaan kota Jombang genting dan mencekam seperti daerah-daerah lain di Indonesia, 2) Mengambil alih gedung-gedung vital dan fasilitas milik CC PKI, seperti yang terjadi di Jl. Hamka Gedung milik orang cina yang berafiliasi dengan PKI direbut oleh GP Ansor dan orang-orang pesantren atau pondok dan sekarang gedung tersebut menjadi Universitas Darul Ulum (UNDAR). Selain diambil alih oleh GP Ansor, ada juga gedung-gedung milik PKI yang dibakar oleh GP Ansor seperti pembakaran gedung CC PKI yang terletak di depan Kodim Jombang dan Juga Gedung Bapergi yang terletak di tempat penjualan daging di pasar legi Jombang. 3) Melaksanakan instruksi dari ketua GP Ansor pusat yaitu KH. Yusuf Hasyim untuk membersihkan PKI di Jombang. 4) Bersinergi dengan TNI AD dan NU untuk menggabungkan kekuatan dan melaksanakan apel siaga di alun-alun Jombang dan melakukan penumpasan PKI di wilayah Jombang. Penumpasan berhenti pada agustus 1966 setelah keluar instruksi dari Pangdam VIII untuk melakukan pemberhentian operasi penumpasan PKI dan keluarga ex anggota PKI mulai diterima dikalangan masyarakat Jombang meski sedikit mendapatkan sanksi sosial berupa sedikit dikucilkan dan dijauhi dari pergaulan masyarakat namun perlahan-lahan keluarga PKI tersebut melai diterima oleh masyarakat seiring berjalanya waktu. Selain itu pemerintah dibawah kepemimpinan presiden Soeharto juga

mengeluarkan peraturan pemerintah yang berisi tentang larangan bagi orang-orang yang terlibat menjadi anggota PKI untuk menjadi abdi negara atau pejabat pemerintahan/PNS. Berdasarkan KEPPRES NO 28 Tahun 1975, tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G 30 S/PKI Golongan C. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988. Setelah itu kehidupan kembali normal dan peristiwa Gestapu harus dijadikan pembelajaran bahwa tidak ada yang dapat menggantikan ideologi pancasila karna pancasila sudah sesuai dengan kultur dan kebudayaan bangsa Indonesia yang mampu menyatukan dinamika masyarakat yang berbeda-beda dan majemuk untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dokumen/Arsip

- 1) Rekaman wawancara pada tahun 2003 yang telah di deskripsikan oleh tim sejarah UNEJ kepada orang Ansor, PKI, pengurus NU yang terlibat pada penumpasan PKI di jombang pasca peristiwa G30S/PKI Tahun 1965-1966
- 2) Arsip Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "*Pernyataan Partai NU dan Ormas-Ormas/Otonom Partai NU dan Badan Keluarganya*" Arsip: Museum Nahdlatul Ulama, B120090105, 1966
- 3) Arsip "*Pucuk Pimpinan GP Ansor atas Gerakan 30 September 1965*" Arsip: Museum Nahdlatul Ulama, B420090020,2
- 4) Arsip Surat PBNU Kepada Dewan Harian PP GP Ansor tentang "*Sikap Tegas Terhadap Komunisme*" Arsip: Museum Nahdlatul Ulama, B.PB/0107.2
- 5) Arsip "*Pengumuman PP Gerakan Pemuda Ansor*" ditanda tangani oleh H.A CHALID MAWARDI dan YAHYA UBAID, SH. Arsip: Museum Nahdlatul Ulama, ns/0017.2
- 6) Arsip, Laporan Lingkungan Tidak Bersih An.CHAIRIL HARIYA UDAYA SH. Nomor Surat 721/1872/330.14/88, Arsip Provinsi Jawa Timur.

B. Koran/Skripsi/Jurnal

1. Skripsi
Nur Azizah,Aderika.Peran GP Ansor dalam penumpasan PKI di Kecamatan kanor kabupaten Bojonegoro tahun 1963-1965.Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.2017
Fauzan, "Peran GP Ansor dalam menjaga keutuhan NKRI(Study Historis Peran GP Ansor dalam Perlawanan Dan Penumpasan G30S/PKI Di Kecamatan Sooko Kabupaten Tuban 1967-1968)",(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Adab Dan Humaniora Jurusan Sejarah Dan kebudayaan Islam,Surabaya)2015
2. Jurnal
Anshori Aan ,Kemenangan Faksi Militan:Jejak Kelam Elit Nadhlatul Ulama akhir september sampai akhir

¹⁴ Arsip Provinsi Daerah Jawa Timur, Laporan Lingkungan Tidak Bersih An.Chairil Hariya Udaya SH,1988, 3 Lembar.

¹⁵ Chairul Anam,Gerak Langkah Pemuda Ansor:Seputar Sejarah Kelahiran(Surabaya:PT Antar Surya Jaya,1990),17-18

oktober 1965, Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol 14. No.1 Juni 2017

Wirawan, Wahyu. AKSI PARTAI KOMUNIS INDONESIA 1926-1965, Lembaga LPPM Universitas Sanata Dharma: Jurnal Historia Vitae, Vol 21. No 1, April 2007

5. Id.Wikipedia.org/Wiki/Gerakan 30 September. Diakses tanggal 20 Juli 2020, pkl 19.18 Wib

C. Buku

Martahan Sitompul, Einar. 2011. NU dan Pancasila. Yogyakarta: Lkis, Hal: 5

Greg Barton, Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, (Yogyakarta: Lkis, 2002), Hal 15

Chairul Anam, Gerak Langkah Pemuda Ansor: Seputar Sejarah Kelahiran (Surabaya: PT Antar Surya Jaya, 1990), 17-18

Marwati Djoened, Pusponugroho dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 387

Kasdi, Aminuddin, "Kaum Merah Menjarah", Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa timur 1960-1965 (Surabaya: Unesa University Press, 2014), Hal 4

Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho, Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) Hal 473-474

Slamet Muljana, Kesadaran Nasional Dan Kolonialisme sampai kemerdekaan, (Yogyakarta: PT Lkis. Pelangi, Aksara, 2008), 168

Dr. Jonaedi Efendi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.HUM. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: PRENADA MEDIA GROUP. 2016. Hal 2-3

Kasdi Aminuddin. Memahami Sejarah. Surabaya. Unesa University Press. 2005. Hal 10-11

Sulistyo, Hermawan. *Palu arit di ladang tebu: sejarah pembantaian massal yang terlupakan, Jombang-Kediri, 1965-1966*. Pensil-324, 2011.

Prof. Kasdi, Aminuddin, MS., dkk. PKI (*Dalang dan Pelaku Kudeta G-30S/1965*), Pesantren Tebuireng Jl. Irian Jaya 10 Cukir Jombang Jawa Timur 61471: YAYASAN MASYARAKAT PEDULI SEJARAH.

Ricklefs, M. C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA, 2008.

D. Wawancara

Abdul Wahab. *Wawancara*, Jombang, 22 Juni 2020.

Hafid Maksum. *Wawancara*, Jombang, 1 Oktober 2020

E. Internet

1. <https://mulyadinpermana.wordpress.com/2014/06/30/gagasan-tentang-peristiwa-politik-1965-dan-relasi-kuasa-antara-abri-ansor-nu-studi-etnografi-di-jawa-timur-oleh-mulyadin-permana/> Diakses tanggal 20 Juli 2020, pkl 13.00 Wib
2. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_5_60.htm. Diakses tanggal 20 Juli 2020, pkl 13.15 Wib
3. <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 20 Juli 2020, pkl 14.00 Wib
4. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/14850/KEPPRES_0281975.htm Tentang peraturan anggota pegawai negeri sipil yang terlibat peristiwa G 30 S/PKI. Diakses tanggal 10 Agustus 2020, pkl 19.00 Wib